

Analisis Ekolinguistik terhadap Berita BNPB mengenai Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Tahun 2025

Sani Hutabarat¹ Mieke Angelika Siburian² Ester Enjelysa Panggabean³ Siti Azura⁴

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: sanihutabarat77@gmail.com¹ miekeangelikasiburian@gmail.com² enjelysapanggabean16@gmail.com³ sitiazurasamsung@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana berita Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau tahun 2025 melalui pendekatan ekolinguistik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi terhadap berita resmi BNPB. Analisis dilakukan berdasarkan dimensi ideologi, sosial, dan budaya dalam teori ekolinguistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa dalam berita BNPB membangun ideologi penegakan hukum melalui penggunaan ekoleksikon seperti “ulah manusia”, “tersangka”, dan “efek jera”. Pada dimensi sosial, masyarakat diposisikan sebagai pihak yang perlu diawasi dan diedukasi, sedangkan pemerintah menjadi pihak yang aktif dalam penanganan karhutla. Pada dimensi budaya, ditemukan perpaduan nilai religius, budaya lokal, dan kepercayaan terhadap teknologi modern dalam penanggulangan bencana. Dengan demikian, bahasa dalam berita BNPB tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun cara pandang masyarakat terhadap lingkungan dan bencana ekologis.

Kata Kunci: Ekolinguistik, Kebakaran hutan dan lahan, BNPB, Wacana lingkungan, Karhutla Riau 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan bencana lingkungan yang berulang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Provinsi ini menjadi salah satu wilayah paling rentan karena sekitar 50% dari total luas wilayahnya merupakan lahan gambut, yang diperkirakan mencapai sekitar 4 juta hektar. Lahan gambut yang kering akibat drainase kanal dan musim kemarau sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan, sehingga menjadikan Riau sebagai daerah prioritas penanganan karhutla secara nasional (BPBD Riau, 2025). Dalam satu dekade terakhir (2014–2025), karhutla menyumbang 41,75% dari total kejadian bencana di Riau, dengan 374 kasus tercatat (Warstek, 2025). Pada tahun 2025, kondisi karhutla di Riau kembali mencapai eskalasi yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak Januari hingga Juli 2025, kebakaran telah melanda seluruh 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau, dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 269 hektare dalam 35 kasus yang dilaporkan. Per 20 Juli 2025, tercatat 790 titik panas (hotspot) aktif, dan dalam waktu 24 jam luas lahan yang terbakar melonjak dari 546 hektare menjadi sekitar 1.000 hektare (Kementerian Lingkungan Hidup, 2025). Sepanjang 2025, hingga akhir Oktober, total lahan yang terbakar di Riau telah mencapai 1.947,18 hektare dengan 499 titik api (BPBD Riau, 2025). Bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis berupa rusaknya ekosistem gambut dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat melalui paparan kabut asap serta menghambat komitmen Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa karhutla di Riau bukan semata-mata fenomena alam, melainkan didominasi oleh ulah manusia. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto

menegaskan bahwa pola titik api bukan berasal dari kekeringan, melainkan dari tindakan pembakaran yang disengaja untuk membuka lahan, terutama untuk perkebunan kelapa sawit (BNPB, 2025). Satgas Penegakan Hukum telah menetapkan 44 orang sebagai tersangka dari 35 kejadian tindak pidana karhutla sepanjang Januari–Juli 2025, termasuk individu, pihak pemodal, dan pemilik lahan (IDN Times, 2025). Kondisi ini mencerminkan urgensi yang tinggi untuk tidak hanya menangani karhutla secara teknis, tetapi juga menganalisis bagaimana bencana ini dikomunikasikan kepada publik melalui media massa resmi. Media massa, termasuk situs resmi pemerintah seperti BNPB, memainkan peran strategis dalam membentuk pemahaman publik terhadap isu lingkungan. Berita bukan sekadar laporan fakta yang netral; bahasa yang digunakan dalam pemberitaan secara aktif mengonstruksi realitas dan memengaruhi cara pandang pembaca terhadap suatu peristiwa (Fadhilah & Suhandano, 2024). Pemilihan diksi, penyusunan kalimat, serta framing yang digunakan wartawan dan institusi pemerintah dapat menggeser persepsi publik tentang siapa yang bertanggung jawab atas suatu bencana, seberapa gawat situasinya, dan tindakan apa yang dianggap paling tepat untuk dilakukan. Misalnya, penggunaan istilah "bencana" atau "ulah manusia" dalam pemberitaan karhutla memunculkan implikasi yang sangat berbeda terhadap kesadaran publik dan arah kebijakan.

Bahasa dalam berita lingkungan tidak pernah berdiri secara netral. Ia selalu membawa muatan ideologis yang tersembunyi di balik pilihan kata, metafora, dan struktur wacana yang digunakan (Suhandano dkk., 2025). Dalam konteks karhutla, sebuah berita yang menekankan aspek penegakan hukum dengan menggunakan diksi aktif dan tegas akan menghasilkan citra berbeda dibandingkan berita yang lebih banyak menggambarkan bencana sebagai peristiwa alam yang pasif. Kajian terhadap konstruksi bahasa dalam berita lingkungan resmi menjadi penting karena narasi yang dibangun oleh lembaga-lembaga seperti BNPB berpotensi membentuk opini publik secara luas dan memengaruhi respons masyarakat terhadap bencana. Kajian yang tepat untuk menganalisis hubungan antara bahasa dan lingkungan dalam konteks ini adalah ekolinguistik. Ekolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji interaksi antara bahasa dan ekologi, termasuk cara bahasa manusia memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku terhadap lingkungan hidup (Steffensen & Fill, 2014). Arran Stubbe, salah satu tokoh utama dalam bidang ini, mengembangkan kerangka analisis ekolinguistik yang komprehensif melalui bukunya *Ecolinguistics: Language, Ecology and the Stories We Live By* (2015). Menurut Stubbe, setiap teks (termasuk berita) mengandung "stories we live by", yakni narasi-narasi tersembunyi yang secara halus membentuk cara manusia memandang dan memperlakukan ekosistem. Kerangka Stubbe mencakup analisis aspek ideologi, framing, evaluasi, identitas, dan narasi yang terkandung dalam sebuah wacana, sehingga sangat relevan untuk mengungkap konstruksi bahasa dalam berita lingkungan resmi seperti yang diterbitkan oleh BNPB.

Sejumlah penelitian ekolinguistik terhadap berita lingkungan telah dilakukan dan menjadi landasan penting bagi penelitian ini. Pertama, Yuniawan dkk. (2023) menganalisis eco-lexicon dalam teks berita konservasi yang dipublikasikan oleh media massa Indonesia, termasuk Kompas dan Suara Merdeka. Penelitian tersebut menemukan bahwa eco-lexicon dalam berita konservasi berfungsi secara instrumental, representasional, dan kultural dalam membentuk literasi lingkungan masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teks berita media resmi sebagai objek analisis ekolinguistik. Namun perbedaannya, penelitian Yuniawan dkk. berfokus pada analisis leksikal berita konservasi satwa liar, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada wacana bencana karhutla dalam berita institusi pemerintah. Kedua, Suhandano dkk. (2025) menerapkan pendekatan corpus-assisted ecolinguistics untuk mengkaji wacana kabut asap lintas batas (transboundary haze) di media Indonesia dan Malaysia dalam kurun 2015–2024. Hasil penelitian ini

mengungkap bahwa media Indonesia cenderung memosisikan kabut asap sebagai bencana, sehingga mengaburkan aktivitas manusia terutama pembukaan lahan sebagai penyebab utamanya. Penelitian tersebut memiliki kemiripan tematik dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji wacana kebakaran dan kabut asap dari sudut pandang ekolinguistik. Namun perbedaan mendasarnya adalah, penelitian Suhandano dkk. menggunakan korpus besar dari dua negara dan menitikberatkan pada tema-tema umum dalam wacana haze, sementara penelitian ini lebih spesifik menganalisis satu berita resmi BNPB dengan pendekatan analisis wacana kualitatif.

Ketiga, Fadhilah dan Suhandano (2024) mengkaji wacana polusi udara Jakarta dalam berita dari situs resmi pemerintah dan CNN menggunakan model ekolinguistik Stibbe. Hasilnya menunjukkan terdapat 17 data yang bersifat ambigu (ambivalent) dalam merepresentasikan solusi polusi udara. Penelitian ini relevan karena sama-sama menggunakan sumber berita resmi pemerintah sebagai objek analisis dengan kerangka Stibbe. Namun demikian, objek dan isu yang diangkat berbeda: penelitian Fadhilah dan Suhandano membahas polusi udara perkotaan, sedangkan penelitian ini secara khusus menyasar bencana karhutla di Riau yang bersumber dari berita BNPB. Penelitian ini menganalisis berita resmi BNPB berjudul "Kepala BNPB: 44 Orang Tersangka Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau" yang dipublikasikan pada 22–24 Juli 2025 di situs resmi <https://bnpb.go.id>. Berita tersebut dipilih karena memuat narasi resmi pemerintah mengenai bencana karhutla Riau 2025 yang melibatkan 44 tersangka dan 35 kejadian tindak pidana pembakaran. Sebagai sumber berita institusional, teks ini mengandung konstruksi bahasa yang strategis: di satu sisi menegaskan dominasi faktor antropogenik (ulah manusia) sebagai penyebab karhutla, di sisi lain menonjolkan respons penegakan hukum sebagai bentuk legitimasi negara. Konstruksi semacam ini layak dikaji secara mendalam melalui lensa ekolinguistik. Meskipun kajian ekolinguistik terhadap berita lingkungan di Indonesia terus berkembang, penelitian yang secara spesifik menganalisis berita resmi BNPB tentang karhutla dari perspektif ekolinguistik masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada berfokus pada media massa umum, situs berita internasional, atau kajian polusi udara perkotaan. Kesenjangan ini menjadi alasan mendasar dilaksanakannya penelitian ini. Dengan menggunakan kerangka ekolinguistik Stibbe (2015), penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana bahasa yang digunakan dalam berita resmi BNPB mengonstruksi realitas karhutla di Riau, termasuk bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan direpresentasikan, serta pesan-pesan ideologis apa yang secara implisit maupun eksplisit terkandung di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana ekolinguistik. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan memahami penggunaan bahasa dalam berita lingkungan, khususnya berita mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau tahun 2025. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman makna, konteks, dan fenomena sosial yang terkandung dalam data bahasa secara mendalam (Denzin & Lincoln, 2018). Dalam penelitian ini, bahasa pada berita resmi BNPB dipandang tidak hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan realitas sosial dan ekologis. Metode yang digunakan adalah analisis wacana ekolinguistik dengan mengacu pada teori *stories we live by* yang dikembangkan oleh Arran Stibbe. Ekolinguistik merupakan kajian yang menelaah hubungan antara bahasa, manusia, dan lingkungan hidup (Steffensen & Fill, 2014). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana teks berita membangun pandangan tertentu mengenai hubungan manusia dengan lingkungan, penyebab terjadinya karhutla, serta respons

pemerintah terhadap bencana tersebut. Kerangka analisis Stibbe digunakan karena mampu mengidentifikasi unsur ideologi, framing, evaluasi, identitas, dan narasi ekologis yang terkandung dalam suatu teks media. Sumber data penelitian ini berupa berita resmi BNPB berjudul "Kepala BNPB: 44 Orang Tersangka Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau" yang dipublikasikan pada tanggal 22–24 Juli 2025 melalui situs resmi BNPB. Data penelitian berupa satuan lingual dalam teks berita, seperti kata, frasa, kalimat, dan paragraf yang mengandung representasi ekologis, penegakan hukum, hubungan manusia dan lingkungan, serta konstruksi penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan teknik simak-catat. Peneliti terlebih dahulu membaca teks berita secara menyeluruh untuk memahami konteks pemberitaan. Selanjutnya, bagian-bagian teks yang relevan dengan fokus penelitian ditandai dan dicatat sebagai data penelitian. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori analisis ekolinguistik yang meliputi ideologi, framing, evaluasi, identitas, dan relasi ekologis dalam teks berita. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña yang terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian dan mengelompokkan data berdasarkan kategori ekolinguistik. Tahap penyajian data dilakukan dengan memaparkan kutipan-kutipan teks beserta interpretasi makna ekologis yang terkandung di dalamnya. Tahap terakhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan untuk menemukan pola ideologi lingkungan dan konstruksi wacana yang dibangun dalam berita BNPB mengenai karhutla di Riau. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teori, yaitu membandingkan hasil analisis dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Triangulasi dilakukan dengan menggunakan konsep ekolinguistik dari Stibbe (2015), Steffensen dan Fill (2014), serta penelitian ekolinguistik terkait wacana lingkungan di media massa. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan validitas dan ketepatan interpretasi terhadap data penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis berita resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berjudul "Kepala BNPB: 44 Orang Tersangka Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau" yang dipublikasikan pada 22–24 Juli 2025. Analisis dilakukan menggunakan teori ekolinguistik Stibbe (2015) dengan tambahan dimensi budaya mengacu pada Yuniawan dkk. (2023), sehingga pembahasan mencakup tiga dimensi makna, yaitu ideologi, sosial, dan budaya. Ketiga dimensi ini ditelaah melalui ekoleksikon, yakni pilihan kata dan frasa dalam berita yang secara langsung berkaitan dengan isu lingkungan, untuk mengungkap bagaimana BNPB membangun wacana tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau kepada publik.

Representasi Makna Dimensi Ideologi

Berdasarkan analisis data, ekoleksikon yang ditemukan dalam berita BNPB tentang karhutla di Riau dikategorikan ke dalam makna ideologi, meliputi: (1) ulah manusia; (2) tindak pidana pembakaran; (3) penegakan hukum; (4) Satgas Penegakan Hukum; (5) efek jera; (6) tersangka; (7) membuka lahan dengan cara dibakar; (8) langkah nyata; (9) strategi penanganan karhutla; dan (10) pengendalian karhutla. Dimensi ideologi merupakan dimensi yang berhubungan dengan nilai, keyakinan, dan cara pandang yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang dan tercermin dalam penggunaan bahasa (Hadirman, 2020). Menurut Stibbe (2015), dimensi ideologi dalam ekolinguistik merujuk pada sistem kepercayaan yang tersembunyi di balik pilihan kata dalam sebuah teks, baik yang mendukung maupun yang berlawanan dengan kelestarian lingkungan. Ekoleksikon yang paling mencolok dalam dimensi

ideologi berita ini adalah frasa "ulah manusia." Kata "ulah" dalam bahasa Indonesia mengandung konotasi negatif, yaitu perbuatan yang ceroboh, nakal, atau tidak bertanggung jawab. Dengan menggunakan kata ini, BNPB secara tidak langsung menyatakan bahwa kebakaran hutan bukan peristiwa alam yang kebetulan, melainkan sebuah kesalahan moral yang dilakukan manusia. Pilihan kata ini mencerminkan ideologi bahwa manusialah yang paling bertanggung jawab atas rusaknya lingkungan, dan oleh karena itu manusia pula yang harus dihukum. Ideologi penegakan hukum dan ketertiban juga sangat dominan dalam berita ini. Ekoleksikon seperti "tindak pidana pembakaran," "Satgas Penegakan Hukum," "tersangka," dan "efek jera" semuanya berasal dari ranah hukum dan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa cara pandang utama yang ditawarkan berita ini dalam memahami karhutla adalah sudut pandang hukum, bukan sudut pandang ekologi atau konservasi. Dengan kata lain, ideologi yang dibangun ialah masalah lingkungan adalah masalah kepatuhan hukum, dan solusinya adalah penindakan terhadap pelanggar.

Di sisi lain, penggunaan frasa "langkah nyata" dan "strategi penanganan karhutla" mencerminkan ideologi lain, yaitu ideologi kepercayaan pada kemampuan negara untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Media tidak mempertanyakan apakah strategi yang ada sudah memadai, melainkan langsung memposisikan pemerintah sebagai pihak yang aktif dan kompeten. Hal ini sejalan dengan temuan Fadhilah dan Suhandano (2024) yang menemukan bahwa berita lingkungan dari sumber resmi pemerintah cenderung membangun citra institusi sebagai pelindung lingkungan yang berwenang dan responsif, tanpa memberi ruang bagi pertanyaan kritis tentang akar struktural permasalahan. Secara keseluruhan, dimensi ideologi dalam berita BNPB ini menempatkan karhutla sebagai masalah perilaku individu yang harus ditindak secara hukum, sekaligus sebagai krisis yang mampu ditangani oleh negara. Bahasa yang digunakan bukan bahasa pelestarian atau pemulihan ekosistem, melainkan bahasa penindakan dan pengendalian. Konstruksi ideologis ini menunjukkan bahwa bahasa dalam berita resmi pemerintah tidak pernah netral, ia selalu membawa nilai dan sudut pandang tertentu (Stibbe, 2015).

Representasi Makna Dimensi Sosial

Berdasarkan analisis data, ekoleksikon dalam berita BNPB yang dikategorikan ke dalam makna sosial meliputi: (1) 44 orang tersangka; (2) 35 kejadian karhutla; (3) masyarakat menghentikan kegiatan membakar; (4) personel darat; (5) patroli titik-titik yang kemungkinan ada orang membakar; (6) mengedukasi masyarakat; (7) partisipasi warga melapor; (8) bekerja sama dengan pihak terkait; (9) penambahan personel; dan (10) rapat koordinasi penanganan karhutla. Dimensi sosial dalam ekolinguistik berkaitan dengan bagaimana bahasa menggambarkan hubungan antara manusia satu dengan manusia lain, serta antara manusia dengan lingkungannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dimensi ini memperlihatkan siapa yang dianggap berperan, siapa yang dianggap bermasalah, dan bagaimana tanggung jawab atas lingkungan dibagi di antara berbagai pihak dalam masyarakat (Hadirman, 2020). Ekoleksikon paling menonjol dalam dimensi sosial berita ini adalah "44 orang tersangka" dan "35 kejadian karhutla." Dua angka ini dihadirkan secara menonjol sejak judul berita, dan berfungsi membangun narasi sosial bahwa ada sekelompok anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran dan kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menariknya, berita tidak menyebut secara spesifik latar belakang para tersangka, apakah mereka petani kecil yang terpaksa membakar lahan karena keterbatasan ekonomi, pemilik lahan skala menengah, atau pihak yang bekerja untuk kepentingan perusahaan besar. Kekaburan identitas sosial pelaku ini secara tidak langsung menjadikan seluruh "masyarakat" sebagai pihak yang perlu diperingatkan, sebagaimana tersirat dalam frasa "semoga ini bisa menjadi efek jera bagi masyarakat."

Di sisi lain, ekoleksikon "menedukasi masyarakat" dan "patroli titik-titik yang kemungkinan ada orang membakar" menggambarkan dua peran sosial yang berbeda yakni masyarakat sebagai pihak yang perlu dididik dan diawasi, serta aparat sebagai pihak yang mendidik dan mengawasi. Konstruksi relasi sosial seperti ini menempatkan negara sebagai pihak yang aktif dan berwenang, sementara masyarakat diposisikan sebagai objek dari berbagai kebijakan. Pola seperti ini, menurut Suhandano dkk. (2025), kerap ditemukan dalam wacana lingkungan resmi pemerintah di Indonesia, di mana partisipasi masyarakat lebih banyak diartikulasikan sebagai kepatuhan terhadap aturan, bukan sebagai keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Ekoleksikon "rapat koordinasi" dan "bekerja sama dengan pihak terkait" juga menarik untuk dikaji. Frasa-frasa ini membangun citra bahwa penanganan karhutla adalah kerja kolektif yang terorganisasi, ada koordinasi antarlembaga, ada pembagian tugas yang jelas, dan ada komitmen bersama untuk mengatasi masalah. Narasi sosial yang terbangun adalah narasi kolaborasi institusional yakni pemerintah tidak bekerja sendiri, melainkan bersama-sama dengan berbagai pihak. Meski demikian, yang disebut sebagai pihak yang terlibat dalam kolaborasi semuanya adalah lembaga pemerintah dan aparat keamanan bukan komunitas lokal, masyarakat adat, atau organisasi lingkungan hidup yang justru sering kali berada di garis terdepan dalam menjaga hutan. Secara keseluruhan, dimensi sosial dalam berita BNPB ini membangun gambaran masyarakat yang terbagi menjadi dua kelompok: pelaku yang harus dihukum dan aparat yang menindak. Sementara peran sosial masyarakat yang lebih luas seperti komunitas lokal yang bergantung pada hutan, petani kecil yang terdesak secara ekonomi, atau warga yang justru aktif menjaga lingkungan hampir tidak mendapat tempat dalam narasi berita ini.

Representasi Makna Dimensi Budaya

Berdasarkan analisis data, ekoleksikon dalam berita BNPB yang dikategorikan ke dalam makna budaya meliputi: (1) bertahun-tahun melihat kebakaran; (2) alhamdulillah datang hujan; (3) musim kemarau; (4) lahan gambut; (5) tradisi membakar lahan untuk membuka kebun; (6) hotspot menurun; (7) operasi modifikasi cuaca (OMC); (8) operasi rutin; dan (9) penerbangan mendatangkan hujan. Dimensi budaya dalam ekolinguistik berkaitan dengan cara pandang, kebiasaan, dan nilai-nilai yang sudah mengakar dalam kehidupan suatu masyarakat dan tercermin dalam bahasa yang mereka gunakan. Kebudayaan tidak hanya merupakan warisan masa lalu, tetapi juga sesuatu yang terus-menerus dibentuk dan diperbarui melalui wacana yang beredar di masyarakat termasuk wacana yang dibangun oleh media dan lembaga resmi pemerintah (Yuniawan dkk., 2023). Salah satu ekoleksikon yang paling kaya secara budaya dalam berita ini adalah "tradisi membakar lahan untuk membuka kebun." Frasa ini sangat penting karena ia mengakui bahwa pembakaran lahan sebenarnya adalah praktik yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat bukan sesuatu yang baru atau tiba-tiba muncul. Dalam banyak komunitas agraris di Sumatera dan Kalimantan, membakar lahan adalah bagian dari siklus pertanian yang telah diwariskan turun-temurun, dan dalam skala kecil bahkan bisa bersifat ekologis karena abu hasil pembakaran menyuburkan tanah. Namun berita ini tidak menjelaskan konteks budaya tersebut secara lebih lanjut, frasa ini hanya hadir sebagai penanda penyebab, bukan sebagai pintu masuk untuk memahami mengapa praktik tersebut masih berlanjut.

Ekoleksikon "alhamdulillah datang hujan" juga mengandung muatan budaya yang menarik. Ungkapan syukur berbasis nilai religius ini menunjukkan bahwa dalam budaya masyarakat Indonesia pada kata keberhasilan termasuk dalam mengatasi bencana tidak semata-mata dikaitkan dengan kemampuan teknologi, tetapi juga dengan campur tangan Tuhan. Dengan memasukkan ungkapan ini ke dalam berita resmi, BNPB secara tidak langsung

membangun koneksi emosional dengan pembaca yang mayoritasnya beragama Islam, sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa penanganan karhutla membuahkan hasil. Ini adalah strategi komunikasi publik yang memanfaatkan nilai budaya religius untuk membangun kepercayaan. Ekoleksikon "lahan gambut" juga perlu dikaji dari sisi budaya. Gambut adalah ekosistem yang sangat khas dan penting di Riau, ia bukan sekadar jenis tanah, melainkan bagian dari identitas geografis dan ekologis masyarakat Riau yang telah hidup berdampingan dengan gambut selama berabad-abad. Namun dalam berita ini, gambut hanya disebut sebagai tempat yang sulit dipadamkan ketika terbakar, tanpa ada penjelasan tentang nilai ekologis dan budayanya. Menurut Yuniawan dkk. (2023), ketika elemen alam yang kaya makna budaya hanya dihadirkan sebagai latar belakang teknis dalam berita, hal itu mencerminkan cara pandang yang menempatkan alam semata-mata sebagai objek yang perlu dikelola, bukan sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat setempat.

Sementara itu, frasa "operasi modifikasi cuaca (OMC)" dan "penerbangan mendatangkan hujan" mencerminkan nilai budaya modernitas dan kepercayaan pada teknologi. Keberhasilan mendatangkan hujan melalui teknologi dihadirkan sebagai sebuah prestasi yang patut disyukuri. Narasi budaya yang terbangun adalah masalah alam bisa diatasi dengan kecanggihan teknologi manusia. Ini adalah cara pandang yang sangat berbeda dengan kearifan lokal masyarakat adat yang memandang alam sebagai mitra yang harus dijaga keseimbangannya, bukan sebagai masalah yang harus ditaklukkan dengan teknologi. Dengan menonjolkan budaya teknokrasi dalam menyelesaikan bencana lingkungan, berita ini secara tidak langsung menggeser nilai-nilai kearifan lokal yang sebenarnya memiliki potensi besar dalam mencegah karhutla sejak dari akarnya. Secara keseluruhan, dimensi budaya dalam berita BNPB ini menunjukkan percampuran antara nilai religius (syukur atas hujan), nilai modernitas (kepercayaan pada teknologi), dan pengabaian nilai kearifan lokal (tradisi membakar lahan disebut sebagai penyebab masalah tanpa penjelasan konteks budayanya). Hal ini menunjukkan bahwa wacana lingkungan dalam berita resmi pemerintah belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif budaya lokal sebagai bagian dari solusi, melainkan lebih cenderung menempatkan teknologi dan hukum sebagai jawaban utama atas persoalan karhutla.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis ekolinguistik terhadap berita Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa bahasa yang digunakan dalam berita mengandung dimensi ideologi, sosial, dan budaya. Pada dimensi ideologi, berita menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan melalui penggunaan istilah seperti "tersangka", "penindakan", dan "efek jera". Pada dimensi sosial, masyarakat diposisikan sebagai pihak yang perlu diedukasi dan diawasi, sedangkan pemerintah dan aparat menjadi pihak utama dalam penanganan karhutla. Sementara itu, pada dimensi budaya ditemukan adanya perpaduan antara nilai religius, budaya lokal, dan penggunaan teknologi modern dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, bahasa dalam berita BNPB tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap lingkungan, bencana, dan upaya penanggulangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2025). *Kepala BNPB: 44 orang tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BPBD Riau. (2025). *Karhutla di Riau 2025: 77,81 Hektare Lahan Terbakar, Status Siaga Ditetapkan di Beberapa Wilayah*. PPID Riau.

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research (5th ed.)*. California: SAGE Publications.
- Fadhilah, N., & Suhandano. (2024). Ambivalence in Jakarta Air Pollution News on Official Government Website and CNN: An Ecolinguistics Study. *SUAR BETANG*, 19(2), 243–257.
- Hadirman. (2020). *Ekolinguistik: Konsep, Metode, dan Aplikasi*. Surabaya: CV. Kanaka Media.
- Ikhsani, H., Ikhwan, M., & Sadjati, E. (2026). Pemetaan Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap Keberadaan Budidaya Lebah Madu di Kecamatan Mempura, Siak. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 21(1), 1-14.
- Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH. (2025, 22 Juli). *Lonjakan Karhutla di Riau, 29 Tersangka Ditangkap dalam Sepekan: Menteri LH Fokus pada Penegakan Hukum dan Pencegahan Terpadu*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. California: SAGE Publications.
- Muktiarum, R. K., Agustin, H., & Gumilar, G. (2026). Advokasi Lingkungan Solidaritas Perempuan Palembang Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir. *Bina Hukum Lingkungan*, 10(2), 267-284.
- Riau Aktual. (2025, 31 Oktober). *Sepanjang 2025, Karhutla Hanguskan 1.947 Hektar Lahan di Riau*.
- Steffensen, S. V., & Fill, A. (2014). Ecolinguistics: The State of the Art and Future Horizons. *Language & Ecology*, 4(1), 1–46.
- Stibbe, A. (2015). *Ecolinguistics: Language, ecology and the stories we live by*. London: Routledge.
- Suhandano, S., Isti'annah, A., Suryani, D. S., Aziz, R. A., Abas, N., Ariffin, K., & Ahmad, B. E. (2025). Transboundary Haze in Indonesian and Malaysian News Media: Corpus-assisted Ecolinguistics. *Studies in English Language and Education*, 12(3), 1546–1564.
- Warstek. (2025, 23 Juli). *Menelusuri Akar Krisis Iklim di Indonesia melalui Siklus Karbon dan Karhutla*.
- Yuniawan, T., Rokhman, F., Rustono, & Mardikantoro, H. B. (2023). An eco-linguistic analysis of conservation news published by mass media in Indonesia. *Cogent Arts & Humanities*, 10(1), 2174519.